

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai Negara demokrasi, kehadiran partai politik adalah suatu keniscayaan dimana kehadirannya diharapkan dapat menjadi penyalur aspirasi rakyat melalui partisipasi rakyat dalam kegiatan politik yang diselenggarakan oleh Negara. Partisipasi rakyat merupakan kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pemimpin Negara secara langsung atau tidak langsung. Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum dan atau menghadiri rapat umum.¹

Partisipasi rakyat dalam agenda politik diharapkan mampu membawa dampak baik bagi kemajuan demokrasi di Indonesia yang akan berimplikasi terhadap kesejahteraan masyarakat.

Akan tetapi, dua puluh tahun sistem demokrasi Indonesia nyatanya tidak berkembang lebih baik. Sebagaimana dilaporkan

¹ Prof. Miriam Budiardjo. *Dasar-dasar ilmu politik*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008). Hlm. 367

oleh salah satu media ternama di Australia, yang fokus terhadap kajian geopolitik di Asia Pasifik, New Mandala, menyampaikan bahwa di bawah pemerintahan Joko Widodo, kualitas demokrasi di Indonesia semakin menurun. Hal ini ditandai dengan berbagai permasalahan politik yang mengancam kesatuan Negara, misalnya, rendahnya partisipasi politik, ancaman makar, intoleransi terhadap perbedaan politik, hingga menguatnya politik identitas.²

Berdasarkan survei yang dilakukan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), pada akhir November 2013 menunjukkan minat masyarakat terhadap politik begitu rendah. LIPI melaporkan 60 persen responden survei yang dilakukan lembaga itu di 31 provinsi dengan 1.799 orang responden menyatakan kurang tertarik dan tidak tertarik sama sekali terhadap politik. Hanya sekitar 37 persen responden survei itu yang menyatakan tertarik atau sangat tertarik terhadap masalah politik atau pemerintahan. Data tersebut juga memaparkan partisipasi politik masyarakat bahwa sejak Pemilu 1999 hingga 2009 grafik partisipasi pemilih terus menurun. Tingkat partisipasi

² <http://www.newmandala.org/20-years-reformasi>, Diakses tanggal 13 Oktober 2018: jam 14.00)

pemilih pada Pemilu 1999 sebesar 92,74 persen, pada Pemilu 2004 sebesar 84,07 persen, dan Pemilu 2009 sebesar 71 persen. Selain itu penurunan partisipasi pemilih juga berimbas kepada pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Secara nasional pemilihan kepala daerah mengalami penurunan partisipasi pemilih pada pemilihan kepala daerah yakni 55-56%. Permasalahan menurunnya kualitas serta kuantitas partisipasi politik masyarakat di era pasca reformasi sebenarnya menjadi indikasi kuat belum mendalamnya pemahaman masyarakat Indonesia mengenai pentingnya hak politik yang dipunyai. Ini merupakan permasalahan serius yang memerlukan penanganan segera. Jika persoalan mengenai rendahnya kesadaran politik tidak segera diatasi, maka persoalan ini dapat dianggap sebagai antitesis terhadap cita-cita reformasi yaitu untuk meyelenggarakan kekuasaan negara bagi kepentingan rakyat.

Pada tahun 2015, sebanyak 829 pasangan calon memperebutkan suara di 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 36 kota. Pilkada 2015 berlangsung relatif lancar tanpa gejolak yang berarti. Namun isu partisipasi masyarakat menjadi masalah

tersendiri dalam Pilkada kali ini. Sebelum hari H, KPU menargetkan tingkat partisipasi nasional di Pilkada 2015 mencapai 77,5%. Namun pada akhirnya, secara nasional hanya 70% pemilih yang memberikan suara mereka. Artinya, tingkat Golput dalam Pilkada serentak 2015 mencapai 30% dan salah satu daerah yang tingkat partisipasinya terendah adalah kota Medan, Sumatera Utara. Di Medan, tingkat partisipasi masyarakat dalam Pilkada hanya mencapai 26,88%. Hampir 3/4 warga Medan memutuskan untuk Golput dengan tidak memberikan suaranya.³

Dari pengertian di atas menunjukkan betapa rendahnya partisipasi politik dan tingkat kesadaran terhadap haknya sebagai warga Negara. Masyarakat pada umumnya hanya dijadikan objek politik dan terpaksa harus bersedia menjadi objek kepentingan Negara disatu sisi dan partai politik disisi lain. Sehubungan dengan kondisi masyarakat yang ada di dalam keterbelakangan politik, kemudian untuk merangsang partisipasi

³ <https://m.republika.co.id>, Diakses tanggal 13 oktober 2018: jam 19.00

politik secara aktif dari masyarakat dalam usaha pembangunan perlu adanya pendidikan politik.

Rendahnya pendidikan politik tidak hanya berimplikasi pada rendahnya partisipasi politik di tengah masyarakat kita hari ini. Akan tetapi ketimpangan pendidikan politik juga menyebabkan konflik pada masyarakat akar rumput. Lima tahun terakhir, kekerasan akibat isu-isu politik juga semakin menguat dikalangan masyarakat kita. Intoleran terhadap preference politik yang berujung pada kekerasan (baik fisik atau non fisik) semakin sering ditemukan. Bahkan, caci maki dan saling lempar *hoax issue* merupakan fenomena yang tidak bisa disangkal lagi. Tentu saja, ini menjadi pasal penting atas menurunnya kualitas demokrasi di Indonesia.

Salah satu penyebab penting dari permasalahan ini ialah hilangnya peran partai politik sebagai salah satu lembaga pembinaan politik bagi masyarakat.

Pendidikan pada dasarnya merupakan sebuah proses untuk mengembangkan diri manusia. Paulo Freire mengungkapkannya bahwa suatu pendidikan yang biasa

membebaskan yakni pendidikan yang menumbuhkan kesadaran kritis transistif dari peserta didik, berubah kemampuan dalam menafsirkan masalah-masalah. Untuk itu penting sekali bagi partai politik untuk bisa memberikan pendidikan politik pada masyarakat.⁴

Pendidikan politik diatur dalam pasal 11 angka (1) huruf a UU No. 2 Tahun 2011 tentang partai politik dimana partai politik berfungsi sebagai sarana pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pasal 31 ayat (1) partai politik melakukan pendidikan politik bagi masyarakat sesuai dengan ruang lingkup tanggung jawabnya dengan memperhatikan keadilan dan keadilan gender dengan tujuan antara lain: a. meningkatkan kesadaran hak dan tanggung kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat. Berbangsa dan bernegara, b. meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, c. meningkatkan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa. Ayat (2) pendidikan politik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (!) dilaksanakan untuk membangun etika dan budaya politik sesuai dengan Pancasila.⁵

Dalam penjelasan UU diatas bahwasannya ditegaskan perlunya pendidikan politik pada masyarakat yang dilakukan oleh

⁴ Tsabit azinar ahmad & syaiful amin. *Iwan fals VS oom pasikom media pendidikan politik alternative* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2010) hlm.2

⁵ Penjelasan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik

partai politik. Didalam UU No. 2 Tahun 2011 tentang partai politik yang berkewajiban untuk meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pendidikan politik.

Dalam Hal ini Partai politik seharusnya melakukan pendidikan politik bagi masyarakat sesuai dengan ruang lingkup tanggung jawabnya, karna pendidikan politik ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.⁶

Pendidikan politik pada negara demokrasi baik jangka panjang, menengah, maupun jangka pendek dengan target-targetnya harus dilaksanakan karna memang pendidikan politik ini sangat berorientasi pada kepentingan nasional atau kepentingan bangsa, karena sasaran utama dari pendidikan politik ini adalah rakyat atau bangsa Indonesia secara keseluruhan.⁷

⁶ Muchamad Ali Syafa'at, *Pembubaran Partai Politik*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2011) hlm. 314-316

⁷ Mahrus Irsyam Lili Romli, *Penggugat Partai Politik*, (universitas Indonesia, Laboratorium Ilmu Politik, 2003) hlm.64

Oleh sebab itu, saya merasa penting untuk meneliti pendidikan politik yang dilakukakan oleh satu partai politik di wilayah saya sebagai tolak ukur sejauh mana partai politik menjalankan fungsinya yang kemudian saya beri judul; ***Factor Kendala Partai Politik dalam Pendidikan Politik Pada Masyarakat (Kajian Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik) Study kasus Pastai Keadilan Sejahtera (PKS) Dewan Pengurus Daerah (DPD) Kota Cilegon.***

B. Rumusan masalah

Adapun rumusan masalah yang peneliti gunakan dalam upaya mempermudah dalam peroses penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pendidikan politik yang dilakukan DPD partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Cilegon?
2. Bagaimana faktor Kendala dan solusi dalam pelaksanaan pendidikan politik di DPD Partai Keadilan Sejahter (PKS) Kota Cilegon?

3. Apakah Pelaksanaan pendidikan politik di DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sudah relevan dengan UU No. 2 Tahun 2001 tentang partai politik?

C. Fokus Penelitian

Dalam skripsi ini, penulis akan membatasi permasalahan yang akan di bahas, agar lebih terfokus pada pokok-pokok permasalahan yang ada beserta dengan permasalahannya. Dengan tujuan agar peneliti tidak menyimpang dari sasaran. Penulis akan melakukan analisis terhadap Faktor Kendala Partai Politik Dalam Pendidikan Politik Pada Masyarakat (Kajian UU. No. 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik) Study Kasus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Cilegon.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pendidikan politik yang dilakukan DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Cilegon.

2. Untuk mengetahui bagaimana faktor kendala dan solisi pembinaan politik pada masyarakat yang dilakukan DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Cilegon.
3. Untuk mengetahui pelaksanaan pendidikan politik di Partai Keadilan Sejahtera sudah relevan atau belum dengan UU No. 2 Tahun 2011 tentang partai politik.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pembandingan bagi pihak yang ingin mengkaji lebih dalam mengenai pelaksanaan pendidikan politik.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi partai politik

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam upaya meningkatkan kemampuan partai melakukan pendidikan politik bagi pengurus, kader, simpatisasi maupun masyarakat.

b. Bagi masyarakat

Masyarakat akan memiliki pengetahuan mengenai sistem politik yang ada, sehingga dengan pengetahuan politik tersebut masyarakat dapat mengetahui hak dan kewajibannya sebagai warga Negara, yang pada muaranya masyarakat akan lebih aktif dalam kegiatan politik seperti mengikuti pemilu dan masuk partai politik.

c. Bagi peneliti

Peneliti mendapatkan pengalaman langsung mengenai pelaksanaan politik yang dilakukan oleh partai politik dalam hal ini Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Cilegon.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang dilakukan peneliti. Ini adalah:

1. Ahmad Syaiful Ashar (2011) yang berjudul Pelaksanaan Pendidikan Politik Oleh DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Semarang, Skripsi jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang (UNNES), menunjukkan pentingnya pendidikan

politik yang dilakukan oleh partai politik pada masyarakat. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada pentingnya pendidikan politik pada masyarakat yang dilakukan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Perbedaan peneliti ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada lokasi atau wilayah yang diteliti. Penelitian yang dilakukan Ahmad Syaiful Ashar dilakukan untuk mengetahui “Pendidikan Politik Oleh DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Semarang”, sedangkan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui “Faktor Kendala Partai Politik Dalam Pendidikan Politik Pada Masyarakat (Kajian UU. No. 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik) Study Kasus DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Cilegon.

2. Andi Ardian Syahrudin (2016) yang berjudul Tinjauan Yuridis Bagi Pelaksanaan Pendidikan Politik Bagi masyarakat Oleh Partai Politik Di Kota Makasar Berdasarkan Undang-undang No. 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik, Skripsi Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum, Universitas Hasanudin Makasar, menunjukkan pentingnya peranan

Pendidikan Politik pada masyarakat yang dilakukan partai politik jika ditinjau dari Undang-undang. Persamaan penelitian ini dengan penulis yang dilakukan oleh Andi Ardian Syahrudin terletak pada kesamaan rendahnya Review of the law. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah terletak pada pencapaiannya. Dimana peneliti terdahulu hanya menjelaskan rendahnya partisipasi masyarakat dan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap haknya sebagai warga Negara, sedangkan peneliti ini menjelaskan Rendahnya pendidikan politik tidak hanya berimplikasi pada rendahnya partisipasi politik di tengah masyarakat kita hari ini. Tetapi juga adanya ketimpangan pendidikan politik yang menyebabkan konflik pada masyarakat, kekerasan akibat isu-isu politik yang semakin kuat dikalangan masyarakat, intoleran terhadap preference politik yang berujung pada kekerasan (baik fisik maupun non fisik) bahkan caci maki dan saling *hoax issue*.

G. Kerangka Pemikiran

Politik dalam kamus lengkap bahasa Jerman-Indonesia diartikan sebagai kebijakan dan usaha.⁸

Deliar Noer mengartikan politik sebagai segala aktivitas atau sikap yang berhubungan dengan kekuasaan dan bermaksud memengaruhi, dengan jalan mengubah atau mempertahankan, suatu macam bentuk susunan masyarakat.⁹

Pada umumnya dapat dikatakan bahwa politik adalah usaha untuk menentukan peraturan-peraturan yang dapat diterima baik oleh sebagian besar warga, untuk membawa masyarakat ke arah kehidupan bersama yang harmonis.

Dalam tirmonologi islam, politik biasanya disamartikan dengan siyasah. Siyasah berasal dari kata *Saasa*, *Yasuusu*, *Siyaasatan* yang berarti mengatur, mengendalikan, mengurus, atau membuat keputusan. Secara istilah Ibnu Qayyim Al-Zauziyah mengartikan Siyasah atau politik sebagai segala perbuatan yang membawa manusia lebih dekat kepada

⁸ Tim prima pena, *Kamus Lengkap Jerman-Indonesia Indonesia-Jerman*, (Surabaya, Gitamedia Pres, 2011). Hlm. 220

⁹ Muhammad Alfian, *Dinamika Politik Di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), hlm. 179

kemaslahatan dan lebih jauh dari kemafsadatan, sekalipun Rasulullah tidak menetapkan dan bahkan Allah SWT. Tidak menentukannya. Menurut Ibn ‘Abid al-Diin, dikutip oleh Ahmad Fathin Bahantsi memberi batasan: Siyasah adalah kemaslahatan untuk manusia dengan menunjukannya kepada jalan yang menyelamatkan, baik di dunia maupun di akhirat. Siyasah berasal dari pada Nabi, baik secara khusus maupun secara umum, baik secara lahir maupun secara batin. Segi lahir siyasah berasal dari para pemegang kekuasaan (Para Sultan dan Araja) bukan dari ulama; sedangkan secara batin siyasah berasal dari ulama pewaris Nabi bukan dari pemegang kekuasaan.¹⁰

Menurut Hasan Al-Banna mengartikan, islam dan politik ibarat dua sisi mata uang yang tak mungkin dipisahkan, karena itu jika ada orang yang berusaha untuk memisahkannya keduanya akan sia-sia. Sebab, islam memiliki politik, yang padanya terletak tujuan kebahagiaan dunia dan akhirat.¹¹ Sedangkan menurut Abdul Wahab Khallaf menyatakan bahwa kata “Siyasah” berarti

¹⁰ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, (Jakarta: kencana, 2003), hlm. 27

¹¹ Aay Muhammad Furkon, *Partai Keadilan Sejahtera: ideologi dan praksis politik kaum muda muslim Muhammad Indonesia kontemporer*, (Bandung: Mizan Publika, 204), hlm. 59

mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintah dan politik.¹²

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ
 مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ
 تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (٥٩)

*Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS. An-Nisa: 59).*¹³

Islam memandang politik sebagai segala suatu upaya yang bisa dilakukan untuk kesejahteraan dan keadilan, walaupun sesuatu tersebut belum ditentukan oleh hadist maupun Al-Quran. Oleh karena itu, diantara ulama banyak yang tidak menyepakati persamaan antara politik dan siyasah.

Dari keseluruhan penjabaran diatas dapat kita rumuskan pengertian yang lebih dalam dan terperinci mengenai pemikiran

¹² Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Siyasaah: Pengantar ilmu Politik Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007), hlm. 26

¹³ Muhammad Shohib Tohir, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Bandung, Mikhraj Khazanah, 2013), hlm. 87

politik. Yaitu suatu proses, cara, atau pola pikir mengenai segala tindakan dan kebijakan terhadap kehidupan bernegara (kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan public, dan alokasi dan distribusi) dalam usaha untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik dan harmonis. Pemikiran politik tersebut bisa berupa peraturan, ide, atau gagasan, yang berkaitan dengan negara.

Partai politik didefinisikan sebagai organisasi publik yang bertujuan untuk membawa pemimpinnya berkuasa dan memungkinkan para pendukungnya untuk mendapatkan keuntungan dari dukungan tersebut. Max Weber mengartikan parti politik sebagai sesuatu yang berkembang pesat diabad 19 karna didukung oleh legitimasi legal rasional. Yang dimana partai politik adalah organisasi yang bertujuan untuk membentuk opini publik.¹⁴

Secara umum dapat dikatakan bahwa partai politik adalah suatu kelompok terorganisir yang anggotanya mempunyai orientasi, niali-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok

¹⁴ M. Zainor Ridho, *Pengantar Ilmu Politik*, (Banten: LP2M,2015), hlm. 84

ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik biasanya dengan cara konstitusional untuk melaksanakan programnya.

Seorang ilmuan, Carl J. Friedrich juga mengartikan partai politik sebagai sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasa terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasa ini, memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat idiil serta materil.

Dari pengertian diatas partai politik berangkat dari anggapan bahwa dengan membentuk wadah organisasi bias menyatukan orang-orang yang mempunyai pemikiran serupa sehingga pemikiran dan orientasi mereka bias dikonsolidasikan. Dengan begitu pengaruh mereka bias lebih besar dalam pembuatan dan pelaksanaan keputusan.¹⁵

Pendidikan pada dasarnya merupakan sebuah proses untuk mengembangkan diri manusia. Pendidikan yang baik, menurut Paulo freirer, adalah pendidikan yang membebaskan,

¹⁵ Mariam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik* ,..., hlm. 403-404

yakni pendidikan yang menumbuhkan kesadaran kritis transsitif dari peserta didik, berupa kemampuan dalam menafsirkan masalah-masalah.

Pendidikan dalam perspektif keritis sangat sesuai untuk diterapkan dalam pendidikan politik masyarakat. Di dalam UU no. 2 tahun 2008 tentang partai politik dijelaskan bahwa pendidikan politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak dan kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga Negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendidikan politik pada masyarakat secara luas merupakan salah satu bentuk pendidikan bagi orang dewasa, sehingga diperlukan pendekatan-pendekatan yang mengarah pada penyadaran masyarakat.¹⁶

Pendidikan politik merupakan bagian dari pendidikan orang dewasa, yang diarahkan pada upaya membina kemampuan individu untuk mengaktualisasikan diri sebagai pribadi yang bebas otonom dan mengembangkan dimensi sosialnya dalam kaitan dengan kedudukannya sebagai warga negara. Mengaktualisasikan diri dapat ditafsirkan sebagai

¹⁶ Tsabit Azinar Ahmad & Syaiful Amin. *Iwan fals VS oom pasikom media pendidikan politik alternative* ,..., hlm.1-2

mengaktualisasikan bakat dan kemampuan, sehingga pribadi individu bisa berkembang dan menjadi lebih aktif dan kreatif untuk berkarya demi bangsa dan negaranya. Holdar and Zakharchenko (ed) (2002) menyebut pendidikan politik sebagai pendidikan publik (*public education*), yaitu upaya pelibatan warga negara dalam suatu komunitas untuk menciptakan budaya partisipasi.

Pendidikan politik dalam arti *orientierungswissen*, yaitu mampu berorientasi pada paham kemanusiaan yang bisa memberikan kebahagiaan dan umat manusia. Secara objektif orang harus berani melihat realitas nyata dan mau mengadakan orientasi ulang terhadap situasi-situasi kondisi politik yang belum mantap, khususnya mengoreksi kelemahan noda dan unsur deskriptif lainnya, sehingga bisa ditemukan alternative penyelesaian yang lebih baik, dan orang bisa keluar dari macam-macam jalan buntu menuju pada keseimbangan dan keserasian hidup bersama.

Dalam hal ini Ruslan (2000) memaknai pendidikan politik sebagai upaya yang dicurahkan oleh lembaga-lembaga

pendidikan, baik formal maupun nonformal, yang berusaha membentuk dan menumbuhkan kepribadian politik yang sejalan dengan kultur politik orang-orang yang bergerak di lembaga-lembaga tersebut pada setiap warga negara, membentuk dan menumbuhkan kesadaran politik dengan segala tingkatannya yang warga menjadi sadar dan mampu memperoleh sendiri kesadarannya, membentuk dan menumbuhkan kemampuan partisipasi politik secara aktif, dalam ikut memecahkan persoalan-persoalan umum masyarakatnya dengan segala bentuk partisipasi yang memungkinkan dan yang mengantarkan kepada perubahan menuju yang lebih baik

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pendidikan politik merupakan bentuk pendidikan orang dewasa yang diberikan kepada generasi muda, dengan jalan menyiapkan kader-kader politik untuk berkompetisi politik dan mendapatkan penyelesaian politik agar menang dalam perjuangan politik.¹⁷

¹⁷ Eko Handoyo & Puji Lestari, *Pendidikan Politik*, (Yogyakarta, Pohon Cahaya, 2017) hlm. 9-12

H. Metode Penelitian

Suatu penulisan skripsi agar lebih terarah dan mudah di pahami maka memerlukan suatu metode yang sesuai dengan objek yang dikaji. Karena metode berfungsi sebagai cara mengerjakan sesuatu untuk mendapatkan hasil yang optimal dan memuaskan, seperti yang diinginkan oleh semua peneliti. Di samping itu metode merupakan cara bertidak supaya peneliti berjalan terarah dan mencapai hasil yang optimal. Berdasarkan asumsi tersebut, maka dalam penyusun skripsi ini, penulis menggunakan Metodologi Penulisan sebagai berikut:

a. Jenis Penelitian

Dalam penulisan ini penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (Field Research), yaitu suatu jenis penelitian yang sumber datanya diperoleh melalui penelitian terhadap lapangan. Penelitian lapangan atau penelitian empiris dilakukan dengan bertitik tolak dari data-data primer yang diperoleh di tempat penelitian.

Sebagai peneliti yang bercorak meneliti suatu partai politik dalam melakukan pendidikan politik pada masyarakat.

b. Penentuan Wilayah

Adapun Lokasi penelitian ini adalah Kantor Dewan Pimpinan Daerah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Cilegon

c. Sumber data

Karena jenis peneliti ini menggunakan penelitian Lapangan maka sumber data yang digunakan adalah Sumber data sekunder dan primer yang berupa buku-buku, informan, atau data lain yang berkaitan dengan mendukung kekuatan penelitian.

d. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Study Kepustakaan dalam penelitian ini dimaksudkan sumber data yang diambil atau diperoleh dari bahan pustaka.

b. Wawancara

Adapun wawancara dalam penelitian ini di gunakan untuk menggalih sumber data primer yang diperoleh dari informan.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut:

BAB I merupakan bab pendahuluan yang membahas tentang : Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

BAB II Merupakan bab yang membahas tentang Kondisi Objektif : Sejarah Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Struktur Organisasi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Kondisi Geografis Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Kondisi Demografis Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Kondisi Sosial Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Visi Misi Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

BAB III merupakan bab yang membahas tentang Landasan Teori : Pengertian Pemikiran Politik, Pengertian Partai Politik, Fungsi Partai Politik, Peran Partai Politik, dan Pengertian Pendidikan Politik

BAB IV merupakan bab yang membahas tentang Hasil analisis Penelitian dan Pembahasan: Memaparkan temuan penelitian dan hasil observasi, gambaran umum informan, dan dokumentasi-dokumentasi penting.

BAB V penutup yang meliputi kesimpulan, berisi tentang penarikan kesimpulan sebagai hasil dari semua rangkaian penelitian, saran yang berisi saran-saran dari peneliti sebagai refleksi dari hasil penelitian yang telah peneliti lakukan. Lampiran-lampiran yang berisi hasil dokumentasi dari peneliti.